

# **PENGARUH REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP TARGET PENDAPATAN DAERAH (SURVEI PADA KABUPATEN/KOTA SELAWESI TENGAH)**

**Gitta Dewi**

*(Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako)*

## **Abstract**

*This research aims to investigate and analyse simultaneous and partial effects of regional original income realization, general allocation fund and specific allocation fund on regional income target in all regency/city in Central Sulawesi. Sample of this research covers 10 out of 11 regencies/city in Central Sulawesi. To select those samples, this research employs purposive sampling method. This is a descriptive verificative research method using multiple linear regressions as an analysis tool. The results show that the effects of original income realization, general allocation fund and specific allocation fund on regional income target (indicated by adjusted R square) is 65.6 % and the rest i.e. 34.4 % affected by other factors. Based on simultaneous test indicates that regional original income realization, general allocation fund and specific allocation fund perform significant effects on regional income target in all regency/city in Central Sulawesi. Partially, regional income realization does not perform significant effect on regional income target. Meanwhile, general allocation fund and specific allocation fund perform significant effects on regional income target.*

**Keywords:** *Regional Original Income Realization, General Allocation Fund, Specific Allocation Fund, Regional Income Target*

Pelaksanaan otonomi daerah secara formal dimulai pada tanggal 1 Januari 2001, hal tersebut sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan UU No. 25 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perbedaan antara UU No. 22 tahun 1999 dengan UU No. 32 tahun 2004, adalah dalam UU No. 32 tahun 2004 ditegaskan mengenai pengurangan/pembatasan kewenangan untuk pemerintah kabupaten/kota dalam perhitungan APBD, karena pada UU No. 22 tahun 1999 ada fenomena yang terjadi, di mana pemerintah kabupaten/kota tidak mengindahkan pemerintah propinsi, sehingga dirasa perlu untuk menentukan secara tegas mengenai batas kewenangan antara pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Otonomi daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal

kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau sebagai pelaku pinggiran. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah sangat baik, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Dalam menjalankan pemerintahan daerah harus disertai dengan tanggung jawab kepada publik sehingga memenuhi harapan masyarakat di daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pembagian keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Undang-undang No. 33 tahun 2004, menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari bagian daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-daerah.

Dana alokasi umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004). Sedangkan dana alokasi khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004).

Di samping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa pendapatan asli daerah, pinjaman daerah, maupun lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004).

Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar Pemerintah Daerah di Indonesia dibidang keuangan daerah adalah bahwa dalam prakteknya pendanaan utama pemerintah daerah adalah bersumber dari dana perimbangan utamanya dana alokasi umum (DAU) dan bukan dari pendapatan asli daerah (PAD), karena hampir di setiap daerah proporsi pendapatan yang bersumber dari PAD begitu minim. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat.

Pada pemerintah daerah kabupaten dan kota Se-Sulawesi Tengah, yang sampai saat ini memiliki 10 (sepuluh) kabupaten dan 1 (satu) kota, penerimaan daerah masih didominasi oleh Dana perimbangan khususnya dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Hal ini tentu saja disebabkan karena penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) masih relatif kecil.

Melihat fenomena tersebut, pemerintah daerah kabupaten/kota Se-Sulawesi Tengah sewajarnya mulai memikirkan dan bertindak guna menggali potensi pendapatan daerah. Tindakan ini merupakan konsekuensi atas ditetapkannya undang-undang mengenai otonomi daerah yang menyebabkan pemerintah daerah harus dapat mengurangi ketergantungan anggaran dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan (DAU, DAK dan DBH).

Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan layanan publik (Mardiasmo, 2002). Guna menggali potensi daerah dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah diperlukan suatu rancangan dan dasar dalam penentuan target. Dalam menentukan target pendapatan didasarkan pada pencapaian di periode sebelumnya.

Target pendapatan daerah merupakan perkiraan hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran. Agar perkiraan pendapatan daerah dapat dipertanggungjawabkan didalam penyusunannya memerlukan perhitungan terhadap faktor-faktor realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhitungkan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor yang menghambatnya.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perkembangan realisasi PAD, DAU, DAK tahun 2007 - 2010, dan Target pendapatan daerah tahun 2008 - 2011 untuk kabupaten/kota Se-Sulawesi Tengah?; 2) Apakah secara simultan realisasi PAD, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap target pendapatan daerah kabupaten/kota Se-Sulawesi Tengah?; 3) Apakah secara parsial realisasi PAD berpengaruh signifikan terhadap target pendapatan daerah kabupaten/kota Se-Sulawesi Tengah?; 4) Apakah secara parsial realisasi DAU berpengaruh signifikan terhadap target pendapatan daerah kabupaten/kota Se-Sulawesi Tengah?; 5) Apakah secara parsial realisasi DAK berpengaruh signifikan terhadap target pendapatan daerah kabupaten/kota Se-Sulawesi Tengah?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisa perkembangan realisasi PAD, DAU, DAK tahun 2007 - 2010, dan target pendapatan daerah tahun 2008 - 2011 untuk kabupaten/kota Se-Sulawesi Tengah.; 2) Untuk mengetahui dan menganalisa secara simultan pengaruh realisasi

pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap target pendapatan daerah kabupaten/kota Se-Sulawesi Tengah; 3) Untuk mengetahui dan menganalisa secara parsial pengaruh realisasi pendapatan asli daerah terhadap target pendapatan daerah kabupaten/kota Se-Sulawesi Tengah; 4) Untuk mengetahui dan menganalisa secara parsial pengaruh realisasi dana alokasi umum terhadap target pendapatan daerah kabupaten/kota Se-Sulawesi Tengah; 5) Untuk mengetahui dan menganalisa secara parsial pengaruh realisasi dana alokasi khusus terhadap target pendapatan daerah kabupaten/kota Se-Sulawesi Tengah.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian *deskriptif-verifikatif*. Jangka waktu penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012. Sedangkan lokasi penelitian dilakukan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah terhadap kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Tengah. Jumlah populasi sebanyak 11 (sebelas) daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2009) yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, dan teknik pengumpulan data melalui teknik dokumentasi dan wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### *Analisis Deskripsi Variabel Penelitian*

Deskripsi masing-masing variabel dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran dan perkembangan mengenai

keadaan masing-masing daerah yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini, yaitu ada 9 kabupaten dan 1 kota Se-Sulawesi Tengah, selama kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2011.

#### 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yani, 2002), oleh karena itu tinggi rendahnya pendapatan asli daerah tergantung pada potensi dari daerah masing-masing dan juga tergantung pada pengelolaan pemerintah daerah tersebut. Potensi daerah yang melimpah, apabila dikelola secara baik dan maksimal oleh pemerintah daerahnya, tentu saja akan memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Untuk 10 daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yang dijadikan sampel, untuk tahun 2007-2010 realisasi pendapatan asli daerah tertinggi diraih oleh Kota Palu sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Buol pada tahun 2007 dan 2009, Kabupaten Morowali untuk pada 2008 dan Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2010.

Realisasi tertinggi pendapatan asli daerah yang diraih oleh Kota Palu disebabkan karena Kota Palu sebagai ibukota propinsi dengan jumlah penduduk yang banyak dan menjadi pusat kegiatan pembangunan untuk Sulawesi Tengah, sehingga memungkinkan Kota Palu dapat mengoptimalkan penerimaan daerah dari sisi pendapatan asli daerah. Sementara untuk kabupaten-kabupaten dengan pendapatan asli daerah yang terendah disebabkan karena masih terdapat kendala dalam pencapaiannya, diantaranya karena realisasi pendapatan asli daerah tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hal ini terlihat pada realisasi dari tiap satuan kerja yang memiliki objek penerimaan, yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan karena adanya beberapa kendala dan hambatan, yaitu relatif masih kurangnya kemampuan aparatur dalam mengelola potensi daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan, mekanisme pengadministrasian belum terlaksana dengan baik dan masih kurangnya kesadaran para wajib pajak/retribusi.

#### 2. Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah

Salah satu komponen dari dana perimbangan yaitu dana alokasi umum (DAU), yang merupakan transfer dari pemerintah pusat dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, yang dihitung berdasarkan alokasi dasar yaitu jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah, serta berdasarkan celah fiskal yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah.

Dari 10 daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, untuk tahun 2007-2010 realisasi penerimaan dana alokasi umum tertinggi adalah Kota Palu pada tahun 2007, Kabupaten Donggala pada tahun 2008, dan Kabupaten Banggai pada tahun 2009 dan 2010. Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Tojo Una-una pada tahun 2007, 2008 dan 2010, dan Kabupaten Buol pada tahun 2009. Tinggi rendahnya dana alokasi umum yang diterima oleh suatu daerah ditentukan oleh beberapa faktor seperti jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah, kebutuhan fiskal daerah dan potensi fiskal daerah.

#### 3. Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah

Selain dana alokasi umum (DAU), transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ada yang disebut dengan dana alokasi khusus (DAK). DAK dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK digunakan khusus untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dalam keadaan tertentu DAK dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas (tiga tahun). Arah kegiatan dari dana alokasi khusus adalah DAK pendidikan, DAK kesehatan, DAK keluarga berencana, DAK infrastruktur jalan dan jembatan, DAK infrastruktur irigasi, DAK infrastruktur air minum dan sanitasi, DAK pertanian, DAK kelautan dan perikanan.

Dari 10 daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, untuk tahun 2007-2010 realisasi penerimaan dana alokasi khusus tertinggi adalah Kabupaten Donggala pada tahun 2007, 2008 dan 2010, dan Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2009. Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Buol pada tahun 2007, Kota Palu pada tahun 2008 dan 2010, dan Kabupaten Morowali pada tahun 2009. Tinggi rendahnya Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh suatu daerah ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya kemampuan keuangan daerah, peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah, serta indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

Pada tahun 2010 terjadi penurunan dana alokasi khusus yang diterima oleh seluruh daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, hal tersebut disebabkan karena alokasi DAK dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berkurang sehingga akan berpengaruh

terhadap transfer DAK ke Pemerintah Daerah yang secara otomatis juga akan berkurang.

#### 4. Target Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar. Target pendapatan daerah merupakan perkiraan hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran. Agar perkiraan pendapatan daerah dapat dipertanggungjawabkan didalam penyusunannya memerlukan perhitungan terhadap faktor-faktor realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhitungkan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor yang menghambatnya.

Dari 10 daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, untuk tahun 2008 target pendapatan daerah tertinggi diraih oleh Kabupaten Donggala, tahun 2009 dan 2011 yang tertinggi adalah Kabupaten Banggai, tahun 2010 yang tertinggi adalah Kabupaten Morowali. Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Touna pada tahun 2008, 2010 dan 2011, tahun 2009 yang terendah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.

#### *Analisis Regresi Linear Berganda*

Sesuai hasil analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan komputer SPSS For Wind Release 16,0 diperoleh hasil-hasil penelitian dari 40 pengamatan dengan dugaan pengaruh ketiga variabel independen (Realisasi PAD, DAU, DAK), terhadap target pendapatan daerah kabupaten/kota Se Sulawesi Tengah dapat diketahui hasil perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**

<b>Dependen Variabel Y = Target Pendapatan Daerah</b>				
<b>Variabel</b>	<b>Koefisien Regresi</b>	<b>Standar Error</b>	<b>t</b>	<b>Sig</b>
C = Constanta (a)	12,383	2,646	4,679	0,000
X <sub>1</sub> = Realisasi PAD	0,087	0,037	0,863	0,394
X <sub>2</sub> = Realisasi DAU	0,851	0,103	7,834	0,000
X <sub>3</sub> = Realisasi DAK	-0,354	0,087	-3,490	0,001
R-Square	= 0,826	F-Statistik	= 25,788	
Adjusted R-Square	= 0,656	Sig. F	= 0,000	

Sumber : Data Diolah, 2012 (Lampiran Hasil Regresi)

Model regresi yang diperoleh dari tabel diatas adalah:

$$Y = 12,383 + 0,087X_1 + 0,851X_2 - 0,354X_3$$

Persamaan diatas menunjukkan, variabel independen yang dianalisis berupa variabel (X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, dan X<sub>3</sub>) memberi pengaruh terhadap variable dependen (Y). Dari persamaan di atas dapat dijelaskan:

1. Constanta = 12,383

Artinya, target pendapatan daerah kabupaten/kota Se-Sulawesi Tengah sebelum adanya variabel independen (Realisasi PAD, DAU, dan DAK) adalah sebesar 12,383.

2. Nilai koefisien regresi variabel realisasi PAD (X<sub>1</sub>) = 0,087

Ini berarti apabila terjadi peningkatan realisasi PAD sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lain dianggap konstan (X<sub>2</sub> dan X<sub>3</sub> = 0), maka target pendapatan daerah akan meningkat sebesar 0,087.

3. Nilai koefisien regresi variabel realisasi DAU (X<sub>2</sub>) = 0,851

Nilai diatas memberi pengertian bahwa jika peningkatan realisasi DAU sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lain dianggap konstan (X<sub>1</sub> dan X<sub>3</sub>=0), maka target pendapatan daerah akan meningkat sebesar 0,851.

4. Nilai koefisien regresi variabel realisasi DAK (X<sub>3</sub>) = -0,354

Nilai diatas memberi pengertian bahwa variabel independen realisasi DAK berpengaruh negatif terhadap target pendapa-

tan daerah. Hal tersebut disebabkan - pada tahun 2010 realisasi DAK untuk seluruh daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan karena alokasi DAK dalam APBN tahun 2010 yang berkurang sehingga berpengaruh terhadap transfer DAK ke pemerintah daerah yang juga akan berkurang.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pembahasan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

#### ***Pengaruh Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Target Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah***

Dalam pelaksanaan desentralisasi, sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan yang berasal dari potensi daerah itu sendiri seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pad yang sah. pendapatan asli daerah juga bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya. Selain pendapatan asli daerah, sumber pendapatan daerah lainnya berasal dari dana perimbangan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan

daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Dana perimbangan ini terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Dari hasil Uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Nilai ini memberikan makna bahwa variabel realisasi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap target pendapatan daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masrida (2011) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap target pendapatan daerah. Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 dijelaskan juga mengenai sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain PAD yang sah.

Rendahnya penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah untuk kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, membuat semua daerah di Sulawesi Tengah sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan (dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil).

Penelitian ini secara empiris membuktikan bahwa target pendapatan daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah sangat dominan dipengaruhi oleh jumlah realisasi dana alokasi umum dari pemerintah pusat dan hal ini menunjukkan bahwa masih sangat tingginya tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat, serta masih rendahnya tingkat kemandirian daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, karena pendapatan daerah lebih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat dan bukan dari pendapatan asli daerah.

### ***Pengaruh Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Target Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah***

Berdasarkan hasil Uji t dalam penelitian ini variabel realisasi pendapatan asli daerah ( $X_1$ ) diperoleh nilai signifikansi  $0,394 > 0,05$ . Hasil ini memberikan makna bahwa secara parsial variabel realisasi pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap target pendapatan. Hal tersebut disebabkan karena kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah masih sangat kecil, hanya berkisar antara 1-10 % untuk semua kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

Meskipun setiap tahunnya sebagian besar daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah menunjukkan adanya peningkatan penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah, namun peningkatan tersebut dirasa masih sangat kecil dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Untuk kedepannya diharapkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota agar lebih maksimal dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi daerahnya, sehingga pendapatan asli daerah bisa terus meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah.

Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah harus ada kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakatnya. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan misalnya kesadaran untuk membayar pajak dan retribusi daerah. Tentu saja hal ini harus selaras, di mana peningkatan pendapatan asli daerah juga harus dimbangi dengan peningkatan layanan publik.

Pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan tersedianya sumber-sumber pembiayaan, sumber pembiayaan tersebut bukan saja berasal dari transfer pemerintah pusat tetapi seharusnya juga berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah. Meningkatnya kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah, harus diiringi dengan peningkatan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah agar kemandirian dan

otonomi yang luas, nyata dan bertanggung-jawab dapat diwujudkan.

Pengelolaan pendapatan asli daerah yang baik adalah pengelolaan yang mampu meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah secara berkesinambungan dengan perkembangan perekonomian yang berkeadilan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi. Pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah melakukan intensifikasi yaitu dengan cara mengefektifkan perda-perda yang mengatur tentang pajak dan retribusi, serta melakukan ekstensifikasi yaitu dengan cara melakukan identifikasi sumber pendapatan untuk mencari peluang-peluang penerimaan pajak dan retribusi yang baru dan menghitung potensi pendapatan riil yang dimiliki oleh daerah dengan metode perhitungan yang sistematis dan rasional.

#### ***Pengaruh Realisasi Dana Alokasi Umum Terhadap Target Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah***

Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Termasuk di dalam pengertian pemerataan kemampuan keuangan daerah adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dari hasil uji t diperoleh nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , hasil ini memberikan makna bahwa secara parsial variabel realisasi dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap target pendapatan daerah. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi dana alokasi umum terhadap total pendapatan daerah, di

mana dana alokasi umum merupakan komponen pendapatan yang paling dominan memberikan kontribusi terhadap total pendapatan daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

Dana alokasi umum untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan Alokasi dasar yaitu jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah, serta berdasarkan celah fiskal yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Penggunaan dana alokasi umum pada prinsipnya dialokasikan untuk membiayai gaji pegawai negeri sipil, kegiatan operasi dan pemeliharaan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pembangunan fisik sarana dan prasarana pelayanan dasar dan pelayanan umum.

Realisasi dana alokasi umum untuk seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah selama kurun waktu tahun 2007-2010, menunjukkan adanya peningkatan. Peningkatan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam melaksanakan desentralisasi fiskal dan menunjang kegiatan pembangunan di daerah. Di sisi lain peningkatan dana alokasi umum secara terus-menerus dan kontribusinya yang lebih dominan dalam pembiayaan daerah dibanding Pendapatan asli daerah menunjukkan masih sangat tingginya ketergantungan Pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat dan masih rendahnya tingkat kemandirian daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

#### ***Pengaruh Realisasi Dana Alokasi Khusus Terhadap Target Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah***

Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu tersebut adalah daerah yang dapat memperoleh dana alokasi khusus berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.



Dari hasil Uji t diperoleh nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ , hasil ini memberikan makna bahwa secara parsial variabel realisasi dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap target pendapatan daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Hal tersebut dikarenakan jumlah dana alokasi khusus yang diterima oleh daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah cukup besar melebihi jumlah pendapatan asli daerah.

Realisasi dana alokasi khusus untuk seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah menunjukkan adanya peningkatan selama kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Pada tahun 2010 dana alokasi khusus yang diterima oleh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah mengalami penurunan. Penurunan jumlah dana alokasi khusus untuk seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah disebabkan karena anggaran dana alokasi khusus untuk kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 15, 54 persen dari tahun 2009.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan metode analisis regresi berganda, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Realisasi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap target pendapatan daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.
2. Realisasi pendapatan asli daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap target pendapatan daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.
3. Realisasi dana alokasi umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap target pendapatan daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.
4. Realisasi dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap target pendapatan daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

## DAFTAR RUJUKAN

- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Masrida. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Target Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Tadulako Palu.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah .
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Yani, A. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.